

Kelas Menengah di Indonesia: Suatu Tinjauan Kepustakaan

SUKANTO*

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kelas menengah menjadi pusat perhatian para intelektual, bahkan menjadi bahan pembicaraan para politikus dan pemangku jabatan penting dalam pemerintahan. Namun demikian, hingga sekarang belum terdapat kesatuan pendapat tentang kelas menengah, terutama mengenai batasan, karakteristik atau ciri-ciri khas, kriteria warga masyarakat yang termasuk dalam kelas menengah dan peranan kelas menengah dalam masyarakat Indonesia.

Hasil dari pengamatan terhadap buku-buku di beberapa perpustakaan, juga menunjukkan bahwa jumlah buku yang mencantumkan secara tegas kata "kelas menengah" dan membahas aspek-aspek kelas menengah secara menyeluruh sangat sedikit. Lagipula, dari jumlah yang sedikit itu, bukan mengenai kelas menengah di Indonesia, melainkan tentang kelas menengah di negara-negara lain. Namun demikian, dalam perkembangan penerbitan buku, majalah dan surat kabar, kata ataupun aspek-aspek kelas menengah cenderung makin banyak dibicarakan, bahkan dicantumkan secara tegas sebagai topik, judul dan tema artikel-artikel dalam majalah dan surat kabar.

SUSUNAN MASYARAKAT BERLAPIS-LAPIS

Dalam setiap masyarakat, senantiasa dijumpai adanya lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Menurut pendekatan sosiologis, pelapisan sosial dalam masyarakat dikenal dengan istilah stratifikasi sosial (*social stratification*). Seorang sosiolog, Pitirim A. Sorokin, mengemukakan bahwa strati-

*Staf CSIS.

fikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau warga masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat.¹

Dari batasan stratifikasi sosial di atas, terlihat adanya istilah atau kata "kelas." Istilah kelas mempunyai banyak arti. Dalam artian sosiologis, ada yang memberi batasan tentang kelas, ialah semua orang yang sadar akan kedudukan, serta diketahui dan diakui oleh masyarakat umum.² Dengan demikian, pengertian kelas paralel dengan pengertian lapisan, tanpa membedakan kriteria pelapisannya. Dan, dalam artian sosiologis, kelas-kelas dalam masyarakat akan selalu ada sepanjang masa.

Istilah kelas juga dijumpai dalam Marxisme. Namun demikian, dalam artian Marxisme, istilah kelas dipergunakan hanya dalam rangka ekonomis. Setiap masyarakat hanya terdiri dari dua kelas, yaitu kelas yang menguasai dan memiliki alat-alat produksi dan kelas yang tidak memiliki alat-alat produksi dan hanya menyumbangkan tenaga dalam proses produksi. Menurut teori Marxisme, kelas-kelas itu akan lenyap dengan sendirinya, sehingga tercipta masyarakat tanpa kelas (*classless society*).

Kriteria yang digunakan untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu kelas dalam artian sosiologis, juga bermacam-macam. Pitirim A. Sorokin mengemukakan tiga kriteria, yaitu ukuran politik, ekonomi dan jabatan.³ Di samping itu, ada yang menggunakan ukuran kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan kehormatan. Dan, jika kelas-kelas dalam masyarakat diteliti lebih dalam, akan diketahui adanya kriteria lainnya, yaitu: (1) besarnya anggota; (2) gaya hidup atau kebudayaan yang sama yang menunjukkan hak dan kewajiban anggota; (3) kelanggengan ikatan anggota; (4) lambang-lambang yang menjadi ciri khas; (5) batas-batas kelas yang satu dan lainnya; (6) antagonisme tertentu.⁴

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, mereka yang memiliki sesuatu yang berharga sangat banyak, digolongkan sebagai kelas atas. Mereka yang memiliki sesuatu dalam jumlah yang sangat sedikit, atau tidak memilikinya sama sekali, digolongkan sebagai kelas bawah. Dan, mereka yang berada di antara dua kelas itu, digolongkan sebagai kelas menengah. Dengan demikian, dalam garis besarnya, setiap masyarakat terdiri atas tiga kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.

¹Pitirim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility* (New York: The Free Press, 1959).

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982).

³Pitirim A. Sorokin, *op. cit.*

⁴Soerjono Soekanto, *op. cit.*

KARAKTERISTIK KELAS MENENGAH

Struktur masyarakat yang berlapis-lapis itu, mungkin sekali telah ada sejak dahulu kala. Ini didasarkan pada pendapat seorang filsuf, Aristoteles, bahwa setiap negara terdiri atas tiga lapisan masyarakat, yaitu lapisan masyarakat yang kaya sekali, lapisan yang sangat miskin dan lapisan masyarakat yang berada di antara dua lapisan itu. Selanjutnya dikemukakan, suatu negara yang kuat harus dibangun dalam pemerataan dan kesamaan. Ini dapat terwujud, jika sebagian besar warga negaranya dari kelas menengah. Karena, kelas menengah merupakan lapisan masyarakat yang paling aman. Mereka tidak mudah iri atau tidak akan berbuat jahat terhadap lapisan masyarakat yang kaya, dan tidak ada alasan yang menyebabkan kaum miskin merasa iri atau berbuat jahat terhadapnya. Oleh karena itu, masyarakat politik yang terbaik berasal dari lapisan menengah.⁵

Kelas menengah sangat menonjol di Eropa Barat menjelang dan sesudah revolusi industri. Ketika ekonomi feodal mengalami kebangkrutan, tumbuhlah pembagian kerja antara penghasil barang-barang mentah dan manufaktur kecil dengan pusat-pusat perdagangan dan industri di kota-kota, yang lama-kelamaan menumbuhkan kelompok perantara. Kelompok perantara sangat kreatif dan inovatif, yang kemudian tumbuh menjadi kelas menengah.⁶ Posisinya sangat unik, yaitu sebagai penyangga atau mediator yang menjembatani kaum borjuis dengan kaum pekerja, sekaligus juga merupakan stabilisator kaum borjuis. Mereka tidak termasuk dalam pola produksi kapitalis, tetapi baru dalam transisi dari pola produksi feodal menuju pola produksi kapitalis. Dan, mereka agak anti-kapitalis serta lebih berilusi reformis, yaitu menghendaki adanya partisipasi, mobilitas vertikal dan khawatir terjadinya proletarisasi.⁷

Bahkan, ada yang menegaskan, kelas menengah di Eropa Barat merupakan borjuis tradisional, yang doktrin utamanya adalah pengakuan hak milik perseorangan, individualisme, persaingan bebas, dan *rule of law*.⁸ Mereka berperan aktif dalam masyarakat, yaitu sebagai penggerak utama dalam tahap permulaan kapitalisme serta pendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi dan politik. Itu semua menunjukkan, konsep kelas menengah di Eropa Barat lebih mempunyai konotasi sosial ekonomi daripada politik. Oleh karena itu, sebagian besar unsur-unsur kelas menengah di Eropa Barat terdiri

⁵Aristoteles, "A Classical View," dalam Reinhard Bendix & Seymour Martin Lipset (eds.), *Class, Status and Power* (California: Berkeley).

⁶Edwin R.A. Seligman (ed.), *Encyclopaedia of the Social Sciences* (New York: The MacMillan Coy., 1962).

⁷Nicos Poulantzas, *Classes in Contemporary Capitalism* (London: Verso Edition, 1979).

⁸J.A.C. Mackie, "Harta dan Kuasa Dalam Masa Orde Baru," *Prisma*, No. 2, Februari 1984.

atas para pelaku kegiatan ekonomi, yaitu para pedagang dan pengusaha industri, serta para petani pengusaha, kelompok profesi dan pegawai negeri.⁹

Konsep dan unsur-unsur kelas menengah di Amerika Serikat dan Jepang, juga hampir sama dengan konsep dan unsur-unsur kelas menengah di Eropa Barat, yaitu berkaitan erat dengan masalah sosial ekonomi. Unsur-unsur kelas menengah di Amerika Serikat yang terbesar adalah para pengusaha kecil dan karyawan kantor atau yang lebih dikenal dengan sebutan *white-collar workers*. Yang termasuk pengusaha kecil adalah para pengecer, para pekerja di sektor jasa, para grosir, dan para pengusaha yang pekerjanya kurang dari 100 orang. Sedangkan yang termasuk *white-collar workers* di Amerika Serikat adalah para tenaga ahli, manajer tingkat rendah, juru tulis, dan para karyawan di bagian administrasi lainnya, serta para pedagang dan para mandor dalam unit-unit industri.¹⁰

Demikian juga di Jepang, konsep kelas menengahnya lebih berkonotasi sosial ekonomi, sehingga sebagian besar unsur-unsurnya pun terdiri dari para pelaku kegiatan ekonomi. Ada kesan yang kuat, peranan kelas menengah di Jepang juga sangat besar dalam pembaharuan masyarakat, seperti peranan kelas menengah di Eropa Barat. Hal itu terlihat dari perubahan yang cepat dalam unsur-unsurnya, yaitu sebelum Perang Dunia II kelas menengah di Jepang lebih dikenal dengan istilah kelas menengah lama, yang terdiri dari para pengusaha kecil dan para pemilik tanah. Setelah Perang Dunia II, muncul kelas menengah baru yang terdiri atas *the salary man*, yaitu *the white-collar employees* yang bekerja di instansi-instansi birokrasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Mereka adalah keturunan kaum samurai, yang lebih berorientasi pada prestasi kerja dan sangat loyal terhadap kaisar. Sikap kaum samurai itu juga berpengaruh pada *the salary man*, yakni sangat setia terhadap instansi dan sangat loyal terhadap pemerintahnya. Gaya hidup mereka sangat khas, yaitu mendambakan kehidupan yang penuh keselarasan dan kedamaian, yang lebih dikenal dengan sebutan *shizuka*.¹¹

KELAS MENENGAH DI INDONESIA

Berdasarkan tinjauan teoretis, yaitu menurut pendekatan sosiologis, maka struktur masyarakat Indonesia juga terdiri dari lapisan-lapisan masyarakat

⁹Yahya Muhaimin, "Politik, Pengusaha Nasional dan Kelas Menengah Indonesia," *Prisma*, No. 3, Maret 1984.

¹⁰C. Wright Mills, "The Middle Classes in the Middle-sized Cities," *The American Sociological Review*, Vol. 2, Desember 1946.

¹¹Ezra F. Vogel, *Japan's New Middle Class* (Los Angeles: California University Press, 1971).

yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya, struktur masyarakat Indonesia pun terdiri atas tiga kelas atau lapisan, yaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Hanya saja, konsep, kriteria, unsur-unsur dan peranan kelas menengah di Indonesia masih belum mendapatkan kesesuaian pendapat dari kaum cendekiawan.

Dalam beberapa perpustakaan juga tidak terdapat buku yang judulnya mencantumkan secara tegas kata "kelas menengah." Bahkan, dalam beberapa buku ditemui beberapa istilah yang mirip dengan istilah kelas menengah, yaitu antara lain istilah golongan pertengahan dan pemasaran, tetapi istilah-istilah itu mempunyai perbedaan arti. Mengenai unsur-unsurnya, yang hingga kini juga masih dipersoalkan, telah banyak dijadikan obyek penelitian serta judul buku dan artikel, seperti istilah elite, cendekiawan, ilmuwan, pamong praja, pegawai negeri, manajer, pedagang, pengusaha dan lainnya. Istilah kelas menengah baru ramai dibicarakan para cendekiawan dalam akhir tahun 1970-an.

Dari beberapa buku dan artikel dalam majalah dan surat kabar, terlihat adanya perbedaan konsep dan kriteria dalam membahas kelas menengah di Indonesia. Di antaranya, ada penulis yang membahas kelas menengah berdasarkan konsep kelas menengah di Eropa Barat. Namun demikian, ada penulis yang menegaskan, jika berdasarkan konsep kelas menengah di Eropa Barat, di Indonesia tidak terdapat kelas menengah. Di samping itu, ada penulis yang membahas kelas menengah berdasarkan kriteria politik. Dan, ada sebagian penulis yang meninjau kelas menengah berdasarkan kriteria jabatan, sehingga kriteria-kriteria yang menonjol dalam pembahasan kelas menengah di Indonesia adalah kriteria ekonomi, politik dan jabatan.

Para penulis yang membahas kelas menengah berdasarkan kriteria ekonomi, antara lain adalah Prof. Dr. D.H. Burger, dalam karangannya yang berjudul "Structuurveranderingen in de Javaanse Samenleving" diterbitkan dalam *Indonesie*, No. 2, 1948/1949.¹² Karangan ini, kemudian disadur oleh Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*.¹³ Di dalam buku itu, dikemukakan bahwa sejak tahun 1800 telah terjadi perubahan dan pembaharuan struktur masyarakat Jawa, yaitu munculnya golongan-golongan sosial baru. Di antara golongan-golongan itu, adalah munculnya golongan menengah, yang terdiri dari para pemimpin usaha dagang dan industri. Di samping itu, Prof. Sudjito Sosrodihardjo, juga membahas struktur masyarakat Jawa berdasarkan kriteria

¹²D.H. Burger, *Perubahan-perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Bhratara, 1977).

¹³Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1970).

ekonomi, yaitu dalam bukunya yang berjudul *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa: Suatu Analisa*.¹⁴ Di dalam buku ini, yang dibahas adalah salah satu unsur kelas menengah, yaitu golongan pemasaran.

Penulis lainnya, yaitu Clifford Geertz, agaknya membahas kelas menengah berdasarkan kriteria ekonomi, politik dan jabatan. Di dalam bukunya yang berjudul "Peddlers and Princes,"¹⁵ yang disusun berdasarkan hasil penelitiannya di Mojokuto dan Tabanan dalam tahun 1950-an, Geertz mengemukakan adanya golongan pertengahan yang baru muncul di dua kota tersebut. Golongan pertengahan yang baru muncul di Mojokuto, berakar dari para pedagang keliling yang sangat taat beragama dan mereka adalah bekas anggota organisasi politik yang berasaskan agama yang sama dengan agama yang dianutnya. Sedangkan di Tabanan, golongan pertengahan yang baru muncul adalah kaum bangsawan yang posisinya dalam birokrasi pemerintah tergeser oleh para pegawai negeri sipil baru. Mereka adalah kelompok-kelompok inovator, yang bergerak maju dari pedagang tradisional atau bangsawan menjadi pedagang atau pengusaha industri yang lebih modern.

Istilah dan aspek-aspek kelas menengah di Indonesia, baru dibicarakan secara agak menyeluruh dalam akhir tahun 1970-an. Dari sejumlah artikel dalam surat kabar dan majalah terlihat, sebagian besar penulisnya membahas kelas menengah berdasarkan kriteria politik. Di antaranya, Ramles Manampang, dalam artikelnya yang berjudul "Kita Mencari Kelas Menengah di Indonesia,"¹⁶ mengemukakan bahwa runtuhnya kekuasaan Soekarno juga disebabkan oleh tumbuhnya lapisan menengah baru. Lapisan menengah baru itu adalah para mahasiswa, wartawan, cendekiawan dan para aktivis dari organisasi-organisasi bebas. Tetapi, ironis sekali, lapisan menengah yang baru muncul itu lambat-laun menghilang dari kehidupan politik, terutama karena masuknya sikap feodal dalam struktur politik yang baru.

Unsur-unsur kelas menengah dan peranannya dalam kehidupan politik, menjadi pusat perhatian para cendekiawan. Rusadi Kantaprawira SH, mengemukakan bahwa struktur sosial di Surabaya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, yaitu penduduk miskin, para buruh pabrik, kaum intelektual kelas menengah dan para petani. Selama ini, kaum intelektual kelas menengah kurang dilibatkan dalam pembangunan. Padahal, secara potensial mereka dapat menjadi sumber oposisi bagi pemerintah. Mereka dapat digolongkan sebagai *the white-collar workers*, yang terdiri atas para pekerja profesional

¹⁴Sudjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa: Suatu Analisa* (Yogyakarta: Karya, 1972).

¹⁵Clifford Geertz, *Penjaja dan Raja* (Jakarta: PT Gramedia, 1977).

¹⁶*Kompas*, 18 Desember 1978.

dan para pelaku kegiatan bisnis. Bahkan, kekuatannya terefleksikan dalam pegawai negeri, para perwira, dokter, guru, dosen, pengacara, teknisi, insinyur, kaum bisnis dan para manajer.¹⁷

Dalam percakapannya dengan harian *Kompas*, Dr. Alfian, mengemukakan bahwa dalam tahun 1980-an akan muncul golongan menengah baru, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka sadar akan hak dan kewajiban politiknya, berkepentingan terhadap sistem politik yang demokratis dan akan menentang praktek-praktek politik yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.¹⁸ Sementara itu, Dr. Arief Budiman, mengemukakan bahwa demokrasi di Indonesia akan datang, jika para pengusaha pribumi sanggup mengubah dirinya menjadi kekuatan kelas menengah yang mandiri.¹⁹

Dari beberapa artikel itu terlihat bahwa kelas menengah di Indonesia pun memiliki potensi kekuatan yang sangat besar. Bahkan, Letjen TNI Yogie S.M. mengemukakan bahwa dinamika masalah keamanan hampir selalu berasal dari kelas menengah bawah. Karena, lapisan atas dan lapisan bawah cenderung bersifat konservatif dan moderat. Pada umumnya, taraf hidup warga masyarakat dari lapisan menengah sudah baik dan horison pandangannya sudah lebih luas, walaupun belum sebaik yang diharapkan. Oleh karena itu, masalah-masalah yang dilontarkannya bukan masalah-masalah konkret sosial-ekonomi. Tetapi, lebih banyak masalah-masalah yang bersifat konsepsional, seperti masalah demokrasi, hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan keadilan.²⁰

Di samping itu, ada penulis yang meragukan keberadaan kelas menengah di Indonesia. Namun demikian, dari pendapat-pendapatnya tersirat adanya harapan agar kelas menengah di Indonesia diperbesar dan diperkuat. Di antaranya, J.A.C. Mackie, mengemukakan bahwa kalau ciri-ciri dan kriteria kelas menengah di Eropa Barat dipergunakan di Indonesia, maka di Indonesia tidak terdapat kelas menengah. Dalam perkembangan kota-kota di Indonesia, memang muncul golongan yang menyerupai kelas menengah, terutama bila dilihat dari gaya hidupnya. Namun demikian, kelas menengah itu bukan pemilik harta yang luar biasa, serta pandangan dan kepentingan politiknya tidak padu. Kesenambungan kesetiaan dan kepentingan lamanya masih memotong kesadaran dan solidaritas kelas jenis mana pun. Dan, afiliasi politiknya masih ditentukan oleh latar belakang agama, suku, keluarga atau asosiasi pendi-

¹⁷Rusadi Kantaprawira SH, "Paradigma Pengkondisian Sosial-Politik Dalam Pembangunan Wilayah Surabaya dan Sekitarnya," dalam *Model Pembangunan yang Diterapkan di Wilayah Surabaya dan Sekitarnya dengan Potensi yang Ada* (Bandung: Seskoad, 1979).

¹⁸*Kompas*, 19 Januari 1980.

¹⁹Arief Budiman, "Demokrasi dan Kelas Menengah di Indonesia," *Kompas*, 23 Juli 1984.

²⁰*Kompas*, 2 Februari 1984.

dikannya, -- yang dikenal dengan sebutan "aliran." Proses terbentuknya kelas menengah di Indonesia sangat lamban, karena masyarakat politik Indonesia bersifat patrimonial.²¹

Penulis lainnya, Dr. Loekman Soetrisno, mengemukakan bahwa kelas menengah ialah sekelompok manusia Indonesia yang benar-benar merdeka dalam pandangan politik dan memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan menentukan. Berdasarkan batasan itu, baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka, belum muncul kelas menengah yang murni, yang benar-benar berfungsi sebagai kelas pembaharu.²² Soetjipto Wirosardjono, mengemukakan bahwa sebutan kelas menengah lebih mempunyai konotasi politik daripada ekonomi. Secara teoretis, kelas menengah merupakan motor penggerak terhadap perubahan dan pembaharuan, baik di lingkungannya maupun dalam tingkat nasional. Namun demikian, pertumbuhannya, baik di kalangan wiraswasta, intelektual, politisi maupun seniman, sangat lamban. Karena, masih kuatnya feodalisme serta belum tumbuhnya budaya entrepreneurship dan industri.²³ Dr. Yahya A. Muhaimin, juga mengemukakan pendapat yang senada, bahwa baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, sifat patrimonialisme masih tampak secara jelas. Karena watak ini, maka kekuasaan politik hanya dipandang sebagai hak alamiah dan tidak ada kaitannya dengan rakyat yang sebenarnya merupakan pemberi kekuasaan. Oleh karena itu, tidak muncul kelas menengah dalam arti yang sebenarnya. Yang disebut kelas menengah sebenarnya hanyalah kalangan masyarakat yang mendapat perlindungan politik, yang dimotori oleh sekelompok modal kuat.²⁴

PENUTUP

Dalam suatu masyarakat senantiasa ada sesuatu yang dihargai oleh para warganya. Sesuatu yang dihargai atau nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat itu menjadi bibit terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat itu. Namun demikian, nilai-nilai dalam setiap masyarakat tidak sama. Oleh karena itu, kriteria-kriteria pelapisan atau penggolongan warga masyarakat ke dalam kelasnya pun berbeda-beda.

²¹J.A.C. Mackie, *op. cit.*

²²Loekman Soetrisno, "Pergeseran Dalam Golongan Menengah di Indonesia," *Prisma*, No. 2, Februari 1984.

²³*Prisma*, No. 2, Februari 1984.

²⁴Yahya A. Muhaimin, *op. cit.*

Kriteria-kriteria pelapisan masyarakat itu juga belum memperoleh kesatuan pendapat di kalangan para ilmuwan. Ada yang mengemukakan bahwa pembedaan penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat dari atas ke bawah dapat dilakukan berdasarkan kriteria ekonomi, politik dan jabatan. Ada ahli yang berpendapat, pelapisan masyarakat dapat dilakukan berdasarkan kriteria kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan kehormatan. Dan, ada yang mengemukakan kriteria lainnya, yaitu besarnya anggota, gaya hidup para anggota, lambang-lambang dan batas-batas kelas yang satu dan lainnya.

Di Eropa Barat, pada jaman revolusi industri, pembedaan penduduk ke dalam kelas-kelasnya lebih didasarkan pada kriteria ekonomi. Pada masa itu, yang menjadi inti kelas menengahnya adalah para pedagang dan pengusaha di sektor industri. Di samping itu, mereka memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu posisi dan peranannya sangat menonjol, yakni sebagai mediator kelas atas dan bawah, dan merupakan penggerak utama terjadinya perubahan sosial, ekonomi dan politik.

Di Amerika Serikat dan Jepang, kriteria penggolongan kelasnya seperti di Eropa Barat, yaitu lebih mendasarkan pada kriteria ekonomi. Akan tetapi, unsur-unsur kelas menengahnya telah berkembang, yaitu intinya tidak lagi hanya para pedagang dan pengusaha industri, melainkan juga para karyawan kantor atau yang lebih dikenal dengan sebutan *white-collar workers*. Para karyawan kantor ini meliputi karyawan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta, yaitu antara lain adalah para tenaga ahli, manajer tingkat rendah, juru tulis dan karyawan-karyawan di bagian administrasi lainnya, serta para pengawas dalam unit-unit industri.

Kriteria-kriteria tentang kelas menengah di Indonesia, juga masih menjadi bahan perdebatan di kalangan cendekiawan. Di antaranya, ada yang mengemukakan, konsep-konsep kelas menengah di Eropa Barat dapat dipakai di Indonesia. Sementara itu, ada yang berpendapat, jika konsep-konsep kelas menengah di Eropa Barat dipergunakan, maka di Indonesia tidak terdapat kelas menengah. Di samping itu, ada yang mengemukakan, kriteria yang tepat untuk menentukan kelas menengah di Indonesia adalah kriteria politik. Dengan kriteria ini mereka yang termasuk dalam kelas menengah adalah yang berperan aktif dalam perubahan politik.

Itu semua menunjukkan bahwa hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat mengenai konsep-konsep ataupun kriteria-kriteria tentang kelas menengah, baik di negara-negara maju maupun di negara kita. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejelas-jelasnya tentang kelas menengah di Indonesia, perlu diadakan penelitian.